

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa:

- 1) *Stakeholder* yang terlibat dalam pembangunan rempang eco-city yaitu terdiri dari, *Government*: Badan Pengusahaan Batam, Pemerintah Kota Batam, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Badan Pertanahan Nasional Kota Batam, Dinas Kesehatan Kota Batam, Dinas Pendidikan Kota Batam, Kejaksaan Negeri Batam, dan Pemerintah Kelurahan Sembulang. *Bisnis*: PT. Makmur Elok Graha *Community*: Kekerabatan Keluarga Besar Melayu (KKBM), Lembaga Adat Melayu (LAM), Labu-Labi, dan Tim Solidaritas Nasional untuk Rempang Akademisi: Politeknik Negeri Batam (Polibatam), Universitas Negeri Semarang (UNES), Universitas Diponegoro, Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), dan Universitas Gadjah Mada (UGM). *Media*: Tribun Batam, Batam Pos, Posmetro Batam, dan Media Massa Nasional (CNN Indonesia, Tempo, Kompas, dll.)

- 2) Pemetaan *stakeholder* dalam pembangunan Rempang Eco-City menunjukkan bahwa setiap kelompok *stakeholder* memiliki tingkat kekuasaan dan kepentingan yang berbeda, yang mempengaruhi peran mereka dalam proyek tersebut. Dalam kategori *players*, terdapat BP Batam, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Kementerian ATR/BPN, dan PT. Makmur Elok Graha (PT. MEG) yang memiliki kekuasaan tinggi dan kepentingan tinggi, berperan aktif dalam pengambilan keputusan strategis dan implementasi proyek. Kelompok *subjects*, yang meliputi masyarakat lokal, Kelurahan Sembulang, media, dan akademisi seperti Politeknik Negeri Batam, memiliki kepentingan tinggi terhadap hasil pembangunan namun kekuasaan yang rendah dalam mempengaruhi keputusan langsung. Di kategori *context setters*, terdapat Pemerintah Kota Batam, Badan Pertanahan Nasional Kota Batam, dan Kejaksaan Negeri Batam yang memiliki kekuasaan tinggi tetapi kepentingan rendah terhadap proyek tersebut, berfungsi sebagai pengarah konteks operasional. Terakhir, dalam kategori *crowd*, terdapat Dinas Kesehatan Kota Batam dan Dinas Pendidikan Kota Batam, yang meskipun memiliki kekuasaan dan kepentingan rendah dalam perencanaan inti proyek, tetap berperan dalam mendukung mitigasi dampak sosial bagi warga terdampak.
- 3) Peran *stakeholder* dalam pembangunan Rempang Eco-City menunjukkan bahwa setiap kelompok memiliki fungsi dan tanggung jawab yang berbeda, yang dipaparkan sebagai berikut:

- *Policy creator* dalam pembangunan Rempang Eco-City terdiri dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, serta Badan Pengusahaan Batam (BP Batam). Ketiga instansi ini berperan penting dalam memberikan legitimasi, merancang kebijakan strategis, dan mengoordinasikan berbagai pihak untuk mendukung implementasi proyek yang termasuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN). Meski telah memberikan kerangka hukum dan kebijakan yang jelas, seperti penerbitan Permenko Nomor 7 Tahun 2023, beberapa aspek menunjukkan bahwa peran mereka belum sepenuhnya optimal, terutama dalam hal transparansi dan komunikasi publik. Ketertutupan BP Batam terhadap informasi kebijakan menyoroti tantangan dalam membangun kepercayaan publik dan memastikan akuntabilitas dalam pelaksanaan proyek.
- Koordinator dalam pembangunan Rempang Eco-City melibatkan berbagai pihak, seperti Pemerintah Kota Batam, BP Batam, Kejaksaan Negeri Batam, Kelurahan Sembulang, Tim Advokasi Solidaritas Nasional untuk Rempang, Kementerian ATR/BPN, BPN Kota Batam, serta organisasi lokal seperti Kekerabatan Keluarga Besar Melayu (KKBM), Lembaga Adat Melayu (LAM), dan Labu-Labi. Masing-masing berperan dalam memfasilitasi koordinasi lintas sektor, menyelaraskan kebijakan, dan memastikan keberlanjutan sosial serta legalitas proyek. Secara umum, sebagian

besar koordinator sudah menjalankan peran mereka dengan baik, seperti Pemkot Batam yang memastikan koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat, serta BP Batam yang menjaga integrasi proyek dengan berbagai pihak. Namun, terdapat tantangan dalam respons dari Tim Advokasi Solidaritas Nasional untuk Rempang yang merasa kurangnya perhatian dari pemerintah terhadap dampak sosial yang dirasakan masyarakat, sehingga peran koordinator masyarakat belum sepenuhnya optimal.

- Fasilitator dalam pembangunan Rempang Eco-City telah dijalankan oleh berbagai stakeholder seperti BP Batam, Dinas Pendidikan Kota Batam, Dinas Kesehatan Kota Batam, dan Tim Advokasi Solidaritas Nasional untuk Rempang. Masing-masing pihak berusaha untuk mendukung transisi masyarakat terdampak, dengan BP Batam menyediakan fasilitas relokasi, Dinas Pendidikan memastikan kelangsungan pendidikan bagi siswa, Dinas Kesehatan memfasilitasi pemindahan layanan kesehatan, dan Tim Advokasi memberikan ruang untuk mediasi dan advokasi masyarakat. Meskipun ada respons positif dari sebagian besar masyarakat, masih terdapat tantangan dalam memfasilitasi seluruh warga, terutama bagi mereka yang memilih tetap tinggal atau menghadapi proses relokasi yang belum sepenuhnya selesai.
- Sebagai *implementer* dalam pembangunan Rempang Eco-City, Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) dan PT. Makmur Elok

Graha (MEG) memainkan peran kunci. BP Batam bertanggung jawab atas pengelolaan lahan, penyediaan fasilitas relokasi, dan pengawasan proyek sesuai dengan kebijakan pemerintah, sementara PT. MEG berfokus pada aspek teknis pembangunan infrastruktur sesuai dengan masterplan yang telah ditetapkan. Kedua stakeholder ini telah menjalankan peran mereka dengan cukup optimal, terutama dalam hal penyediaan rumah relokasi dan pengembangan infrastruktur. Meskipun demikian, tantangan operasional dan koordinasi antar pihak terkait masih dapat mempengaruhi efektivitas implementasi proyek, dan perlu perhatian lebih lanjut untuk memastikan kelancaran pelaksanaan yang berkelanjutan.

- Akselerator utama dalam pembangunan Rempang Eco-City yaitu Media massa dan akademisi, khususnya Politeknik Negeri Batam, berperan sebagai. Media massa, melalui pemberitaan yang luas dan mendalam, telah berhasil mempercepat adopsi kebijakan dengan meningkatkan kesadaran publik dan mendorong respons cepat terhadap isu-isu kritis terkait proyek ini. Selain itu, akademisi, terutama Poltek Batam, turut mempercepat implementasi kebijakan melalui kerja sama dengan PT. MEG dalam bidang penelitian, penerapan teknologi, dan pengembangan sumber daya manusia yang relevan dengan kebutuhan proyek.

Tabel 17. Klasifikasi Pemetaan dan Peran Stakeholder dalam Pembangunan Rempang Eco-City

Komponen Pentahelix	<i>Stakeholders</i>	<i>Pemetaan Power dan Interest</i>	Peran
Government (Pemerintah)	Badan Pengusahaan Batam	<i>Players</i>	Berperan sebagai <i>policy creator, coordinator, facilitator, dan implementer</i>
	Pemerintah Kota Batam	<i>Context Setter</i>	Berperan sebagai <i>coordinator</i>
	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	<i>Players</i>	Berperan sebagai <i>policy creator</i>
	Kementerian ATR/BPN	<i>Players</i>	Berperan sebagai <i>coordinator</i>
	Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM	<i>Players</i>	Berperan sebagai <i>policy creator</i>
	Badan Pertanahan Nasional Kota Batam	<i>Context Setter</i>	Berperan sebagai <i>coordinator</i>
	Dinas Kesehatan Kota Batam	<i>Crowd</i>	Berperan sebagai <i>facilitator</i>
	Dinas Pendidikan Kota Batam	<i>Crowd</i>	Berperan sebagai <i>facilitator</i>
	Kejaksaan Negeri Batam	<i>Context Setter</i>	Berperan sebagai <i>coordinator</i>
	Pemerintah Kelurahan Sembulang	<i>Subject</i>	Berperan sebagai <i>coordinator dan facilitator</i>
Bisnis	PT. Makmur Elok Graha (MEG)	<i>Players</i>	Berperan sebagai <i>implementer</i>
Community (Masyarakat)	Kekerabatan Keluarga Besar Melayu (KKBM)	<i>Subject</i>	Berperan sebagai <i>coordinator</i>

	Lembaga Adat Melayu (LAM)	<i>Subject</i>	Berperan sebagai <i>coordinator</i>
	Labu-Labi	<i>Subject</i>	Berperan sebagai <i>coordinator</i>
	Tim Solidaritas Nasional untuk Rempang	<i>Subject</i>	Berperan sebagai <i>coordinator</i> dan <i>facilitator</i>
Akademisi	Politeknik Negeri Batam (Polibatam)	<i>Subject</i>	Berperan sebagai <i>accelerator</i>
Media	Tribun Batam	<i>Subject</i>	Berperan sebagai <i>accelerator</i>
	Batam Pos	<i>Subject</i>	Berperan sebagai <i>accelerator</i>
	Posmetro Batam	<i>Subject</i>	Berperan sebagai <i>accelerator</i>
	Media Massa Nasional (CNN Indonesia, Tempo, Kompas, dll.)	<i>Subject</i>	Berperan sebagai <i>accelerator</i>

4.2 Saran

Untuk menjalankan program strategis dengan skala nasional seperti Rempang Eco-City, sangat penting untuk memperhatikan dinamika hubungan antar stakeholder yang terlibat, mengingat dampak besar yang ditimbulkan oleh proyek ini, tidak hanya terhadap lingkungan, tetapi juga terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat sekitar. Dalam penelitian ini, penulis menemukan bahwa meskipun pembangunan Rempang Eco-City bertujuan untuk memberikan manfaat jangka panjang, namun masih terdapat ketidakpuasan dan protes dari sebagian masyarakat yang merasa terdampak. Selain itu, proses pembangunan yang dirasa

kurang transparan menambah ketegangan antara pihak pengembang, pemerintah, dan warga lokal. Berdasarkan temuan tersebut, beberapa saran yang dapat disampaikan untuk meningkatkan keberhasilan pembangunan adalah:

- 1) Untuk meningkatkan transparansi dalam menyampaikan kebijakan dan perkembangan proyek Rempang Eco-City kepada publik. Pendekatan komunikasi yang lebih terbuka sangat penting untuk membangun kepercayaan masyarakat dan memastikan akuntabilitas dalam pelaksanaan proyek. Oleh karena itu, implementasi pendekatan komunikasi berbasis komunitas (*community-based approach*) akan sangat relevan dalam konteks Rempang Eco-City. Melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses komunikasi, dengan memberikan ruang bagi mereka untuk mengungkapkan pendapat, kekhawatiran, dan harapan, dapat mempercepat penerimaan dan partisipasi warga dalam pembangunan. Salah satu cara yang dapat diterapkan adalah dengan mengadakan forum terbuka, dialog antar warga, dan penyuluhan langsung untuk menjelaskan kebijakan dan perkembangan proyek secara lebih rinci. Selain itu, melibatkan perwakilan komunitas atau tokoh masyarakat sebagai mediator dapat memperlancar komunikasi dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap keputusan yang diambil. Penggunaan saluran komunikasi yang mudah diakses, seperti media lokal, grup diskusi di media sosial, dan pusat informasi terbuka, juga akan menciptakan ruang dialog yang lebih konstruktif, meningkatkan pemahaman warga, dan mengurangi ketidakpastian terkait proyek tersebut. Dengan pendekatan ini, pemerintah dapat memperkuat

hubungan dengan masyarakat, mengurangi potensi konflik, serta mendorong partisipasi aktif dalam proses pembangunan.

- 2) Untuk mengoptimalkan peran koordinator masyarakat, terutama Tim Advokasi Solidaritas Nasional untuk Rempang dan organisasi masyarakat lainnya, dalam proses relokasi dan mitigasi dampak sosial yaitu dengan menerapkan pendekatan yang lebih inklusif dan berbasis kolaborasi. Pendekatan ini dapat memperkuat komunikasi dua arah antara pemerintah, pengembang, dan masyarakat, dengan tujuan untuk memastikan bahwa aspirasi dan kekhawatiran warga dapat terdengar dan ditanggapi secara konstruktif. Dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat, pemerintah dan koordinator masyarakat dapat memfasilitasi lebih banyak forum terbuka, seperti pertemuan tatap muka, yang melibatkan warga yang terdampak langsung serta tokoh masyarakat sebagai fasilitator. Dengan pendekatan ini, diharapkan resistensi terhadap relokasi dapat diminimalisir, dan proses pembangunan Rempang Eco-City dapat berjalan dengan lebih lancar serta memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat setempat.
- 3) Untuk memperkuat kolaborasi antara sektor pemerintah, akademisi, dan swasta dalam mengatasi tantangan operasional dalam pembangunan Rempang Eco-City, pendekatan yang harus diterapkan harus lebih bersifat terstruktur dan berfokus pada penyatuan sumber daya serta keahlian dari masing-masing sektor. Salah satu langkah penting adalah membangun *platform* kolaborasi yang dapat menghubungkan BP Batam, PT. MEG,

Poltek Batam, dan pihak-pihak terkait lainnya. *Platform* ini dapat berbentuk forum yang memfasilitasi pertemuan rutin antara semua pihak untuk mendiskusikan perkembangan proyek, tantangan yang dihadapi, serta solusi yang bisa ditemukan bersama. Kolaborasi antara Poltek Batam dan PT. MEG dalam bidang riset dan pengembangan teknologi harus diperkuat untuk menghasilkan solusi inovatif yang dapat mengatasi masalah yang muncul selama proses pembangunan. Dalam rangka mengurangi dampak sosial dan lingkungan yang dihadapi oleh masyarakat selama proses pembangunan, kolaborasi antara sektor swasta, pemerintah, dan akademisi harus mencakup penyusunan rencana bersama yang berbasis bukti dan riset. Dengan pendekatan ini, kolaborasi antara sektor pemerintah, akademisi, dan swasta akan semakin terarah dan fokus pada penyelesaian masalah operasional yang dihadapi dalam proyek Rempang Eco-City. Kerjasama yang lebih sinergis dapat mengurangi hambatan-hambatan dalam implementasi, mempercepat proses pembangunan, serta memastikan bahwa proyek ini dapat berjalan dengan efisien, inovatif, dan berkelanjutan.